



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Setelah kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia masih mengalami praktek-praktek imperialisme. Imperialisme tersebut tidak lagi hadir dalam bentuk fisik melainkan hadir dalam bentuk doktrin ideologis melalui mekanisme ekonomi dan politik. Doktrin ideologis yang dikembangkan oleh negara-negara Barat terhadap Indonesia tersebut, membentuk hubungan yang tidak seimbang antara negara Barat sebagai negara superior dan Indonesia sebagai negara inferior. Pola hubungan seperti inilah yang menjadikan Indonesia mudah diduduki kembali melalui ekspansi negara Barat. Salah satunya adalah dominasi korporasi multinasional (MNC) yang bergerak dalam industry franchise makanan cepat saji (*fast food*). Dominasi korporasi multinasional inilah yang kemudian menguasai sumberdaya di Indonesia.

Korporasi multinasional (MNC), yaitu korporasi yang memiliki fasilitas dan aset-aset di negara lain di luar negara asal korporasi tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kantor atau cabang di negara-negara lain dan biasanya memiliki kantor pusat tempat mereka mengkoordinasikan manajemen global. Korporasi-korporasi besar yang berasal dari negara maju secara masiv mendirikan cabang-cabangnya serta menyebar hampir di seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pada tahun 1970-an, korporasi multinasional ini menerapkan prinsip efisiensi, yaitu prinsip penggunaan sumber-sumber dengan efisiensi maksimal untuk

memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Implikasinya, ekspansi MNC ke Indonesia adalah untuk mencapai tujuannya yaitu meminimalkan biaya produksi. Korporasi berbasis multinasional ini lebih memilih untuk melakukan ekspansi ke negara dunia ketiga seperti Indonesia, dimana mereka dapat memperoleh tenaga kerja murah dan tanpa adanya tindakan demonstrasi atau protes, bahan baku murah dan juga pasar yang strategis.

Dalam konteks ini, globalisasi merupakan pembuka jalan bagi terjadinya ekspansi korporasi multinasional di Indonesia. Sedangkan neoliberalisme adalah kendaraan yang digunakan oleh negara-negara Barat untuk melegalkan dominasinya terhadap pasar di Indonesia. Sebagai ideologi yang lahir atas kritik teori ekonomi Keynesian, neoliberalisme yang digagas oleh Friedrich August von Hayek dan Milton Friedman menentang peran negara dalam perekonomian. Pemerintah hanya berperan untuk menyediakan sebuah kerangka dimana rakyat dan masyarakat dapat mengejar tujuan-tujuan mereka, bukan untuk menjamin kesejahteraan umum. Dampaknya, pada tahun 1980-an, pemerintah Indonesia menjadi tidak berdaya untuk menahan arus investasi yang mengalir ke negaranya.

Globalisasi dan neoliberalisme, hadir ditandai dengan perkembangan paham kapitalisme. Hal ini teridentifikasi dari semakin terbukanya peran pasar, investasi, proses produksi perusahaan-perusahaan multinasional. Hal ini semakin dikuatkan pula oleh ideologi dan tata dunia perdagangan baru di bawah suatu aturan yang ditetapkan oleh organisasi perdagangan bebas secara global. Kapitalisme pasar bebas ini menerapkan tanggungjawab social bisnis dengan menggunakan seluruh

sumberdayanya untuk aktivitas yang mengabdikan pada akumulasi modal. Alasan inilah yang mendukung mengapa industri franchise multinasional segan untuk berinvestasi di Indonesia. Selain pangsa pasar yang strategis, Indonesia adalah negara dengan surplus tenaga kerja. Dengan kondisi yang demikian, maka tuntutan atas penyediaan lapangan pekerjaan juga semakin tinggi. Hal inilah yang kemudian menjadikan pemerintah membuka akses bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia baik dalam skala nasional ataupun lokal.

Pada awal tahun 1990-an, ekspansi industri franchise makanan cepat saji (*fast food*) yang berbasis multinasional seperti McDonald's, KFC, Pizza Hut, AW dan sejenis lainnya, telah berkembang dan sukses dalam penguasaan pasar industri makanan di Indonesia. Beberapa industri makanan cepat saji yang berbasis multinasional ini melakukan ekspansinya ke beberapa negara melalui sistem franchise atau waralaba. Pemegang franchise di masing-masing negara adalah satu perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dalam skala nasional. Franchise ini membuka cabang ke seluruh wilayah atau kota-kota besar di Indonesia. Dengan hadirnya cabang-cabang inilah, pemerintah Indonesia dapat memperoleh keuntungan dari sisi ketenagakerjaan melalui pemberdayaan dan penyerapan tenaga kerja lokal. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kehadiran MNC dapat menyediakan peluang kerja, pelatihan, serta transfer ilmu, teknologi, dan keterampilan bagi tenaga kerja lokal, yang mana akan berakibat pada meningkatnya tingkat produktivitas kerja.

Tercatat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ada lima restoran cepat saji terbesar di Indonesia. Diantara kelima restoran tersebut adalah McDonald's yang

jumlah gerainya telah mencapai 112 gerai di seluruh Indonesia, KFC yang jumlah gerainya mencapai 426 di seluruh Indonesia dengan laba Rp.139 miliar dari total penjualan sebesar Rp 2,6 triliun, Dunkin Donuts dengan laba yang dimilikinya mencapai Rp 80 triliun, Pizza Hut dengan jumlah gerainya sebanyak 200 di seluruh Indonesia, dan terakhir adalah Hoka Hoka Bento yang memiliki gerai sebanyak 120 hingga tahun 2010.¹

Berkenaan dengan semakin maraknya ekspansi restoran cepat saji berbasis multinasional di Indonesia, Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan Nomor 07 tahun 2013 tentang pemberian kesempatan pemilik franchise mengurangi kepemilikan tunggal gerai dengan cara penyertaan modal. Namun, peraturan ini dinilai justru memberikan keuntungan bagi pemodal asing. Hal ini dikarenakan bahwa pola hubungan yang terbentuk dalam model industri yang demikian semakin meningkatkan peluang bagi pemodal asing karena pemerintah memberikan fasilitas penyertaan modal dalam pola bisnis industri franchise.²

Sebagai salah satu kota terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduknya lebih dari 2,7 juta jiwa dan pusat bisnis, perdagangan, industri, serta pendidikan di kawasan timur Pulau Jawa dan sekitarnya, Surabaya adalah kota yang menjadi destinasi favorit bagi investor franchise makanan cepat saji untuk

¹ Ririn Indrawati. *Lima Restoran Cepat Saji Terbesar Di Indonesia* [berita online]. Merdeka.com, 16 Februari 2013 pukul 12:52:04, diakses pada tanggal 28 Agustus 2015, pukul 16.04 WIB; tersedia dari <http://merdeka.com/uang/lima-restoran-cepat-saji-terbesar-di-indonesia.html>; Internet.

² Ardyan Mohamad. *Peraturan Waralaba Restoran Dinilai Menguntungkan KFC dan McDonald's* [berita online]. Merdeka.com, 14 Februari 2013 pukul 16.44:00, diakses pada tanggal 28 Agustus 2015, pukul 16.59 WIB; tersedia dari <http://merdeka.com/uang/peraturan-waralaba-restoran-dinilai-untungkan-kfc-dan-mcdonalds.html>; Internet.

menginvestasikan sumberdaya modal mereka. Potensi lainnya yang juga memberikan peluang bagi perkembangan industry franchise makanan cepat saji di kota Surabaya adalah karena tingginya permintaan atas ketersediaan lapangan pekerjaan. Sebagai pihak yang mewakili permintaan tersebut, MNC memiliki posisi tawar yang lebih tinggi atas penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sedangkan bagi pemerintah kota Surabaya, bisnis makanan cepat saji yang berbasis multinasional ini juga mempunyai potensi bagi perkembangan pembangunan kota Surabaya. Kondisi yang demikian inilah yang kemudian membentuk proses tawar menawar antara pemerintah kota dan pihak investor. Namun, dengan ideologi kapitalisme neoliberalnya, investor mempunyai posisi tawar yang lebih besar daripada pemerintah. Akibatnya, dari sinilah awal MNC memainkan proses politiknya.

Posisi tawar yang lebih besar oleh investor atas pemerintah menciptakan peluang bagi hadirnya Restoran fastfood yang berbasis franchise sebagai upaya untuk menambah lapangan kerja baru. Fenomena ini dapat kita lihat dengan diresmikannya Carl's Jr. Dibawah manajemen Mahadya, yang melakukan ekspansinya ke kota Surabaya yang pertama kali membuka gerainya di bandara Internasional Juanda dan beroperasi 24 jam. Untuk pembukaan satu outlet Carl's Jr dibutuhkan investasi sebesar Rp. 2,5-3 miliar dan dapat memperkerjakan 15-18 orang.³

³ Eva Martha Rahayu. *Grup Trakindo Mengakuisisi Fastfood Carl's Jr* [majalah bisnis online]. SWA.co.id, 29 Maret 2014, diakses pada tanggal 28 Agustus pukul 19.36 WIB; tersedia dari <http://swa.co.id/corporate/corporate-action/grup-trakindo-mengakuisisi-fastfood-carl's-jr.html>; Internet.

Selain Carl's Jr, Pemerintah kota Surabaya juga memberikan peluang bagi ekspansi restoran fast food berbasis multinasional. Diantaranya yang cukup fenomenal adalah McDonald's. Pemegang master franchise restoran cepat saji McDonald's di Indonesia, PT Rekso Nasional Food berencana menambah jumlah gerainya menjadi 160 sampai di akhir tahun 2013. Hal ini dikarenakan wilayah Surabaya sendiri adalah wadah yang sangat berpotensi dalam pengembangan bisnis fastfood berbasis multinasional.⁴

Praktek kekuasaan multinasional dalam sistem ketenagakerjaan yang diterapkan oleh industry franchise makanan cepat saji berbasis multinasional tampak dari respon pemerintah yang terkesan memaksakan revisi UU No. 13 Tahun 2003 terkait terbitnya Inpres No. 3 tahun 2006 tentang Paket Peraturan Perbaikan Iklim Investasi, yang di antaranya menyangkut ketenagakerjaan di Indonesia. Pemerintah ingin mengurangi pengangguran dengan perbaikan iklim investasi, di mana hal yang menjadi ganjalan menarik minat investasi adalah adanya beberapa masalah utama di bidang ketenagakerjaan yang sering dibicarakan investor. Masalah tersebut antara lain, tentang besaran pesangon, status karyawan (outsourcing, dan pekerja kontrak), proses pemutusan hubungan kerja (PHK), unjuk rasa, dan upah. Hal ini dilakukan untuk meredam gejolak atau masalah yang bisa saja mengganjal MNC dalam

⁴ Kabarbisnis. *McD Indonesia Tambah 14 Gerai Sampai Akhir Tahun*[tabloid online]. Kabarbisnis.com, 19 September 2013, diakses pada tanggal 28 Agustus 2015 pukul 20.03 WIB; tersedia dari www.kabarbisnis.com/m/read/2841816/mcd-indonesia-tambah-14-gerai-sampai-akhir-tahun.html; Internet.

pengoperasiannya, karena jika tidak, maka para investor mengancam pemerintah dengan menarik investasinya ke wilayah yang sedikit tuntutan.

Isu-isu ketenagakerjaan, kerap kali menjadi isu yang menjadi fokus utama dalam kajian industrial. Salah satunya adalah tentang *outsourcing*. Banyak bisnis franchise makanan cepat saji yang merekrut dan memperkerjakan pekerja *outsourcing*. Mereka seringkali ditempatkan dalam bidang pekerjaan yang tidak memberikan keterampilan khusus dan tidak adanya jaminan kerja, baik oleh vendor atau perusahaan yang memperkerjakannya. Pekerja *outsourcing* tidak ada job security dan jaminan pengembangan karier, tidak ada jaminan kelangsungan kerja, tidak memperoleh THR dan tidak diberikan pesangon setelah di PHK, serta tidak terpenuhi hak-hak dasar lainnya sebelum, selama dan setelah bekerja. Dilegalkannya praktek *outsourcing* melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, juga menunjukkan intervensi multinasional untuk melakukan fleksibilitas tenaga kerja. Prinsip tenaga kerja yang fleksibel dalam rekrutmen serta kontrak dan biasanya dipakai sebagai eufimisme bagi kemudahan pemecatan oleh perusahaan multinasional.

Sistem ketenagakerjaan yang dipraktekkan oleh bisnis yang berbasis multinasional, tetap saja tidak dapat terlepas dengan masalah hak asasi manusia. Selain masalah *outsourcing*, masalah-masalah lainnya seperti pembayaran upah di bawah standar, eksploitasi pekerja di bawah umur, diskriminasi gender, pelecehan seksual, bekerja di bawah kontrol, dan lingkungan kerja yang tidak aman. Pada tahun 2000, International Labour Organization (ILO) mengemukakan

fakta bahwa terdapat lebih dari 200 orang yang terlibat dalam kegiatan eksploitasi pekerja di negara berkembang. Pada aspek pembayaran upah, terdapat ketimpangan yang sangat signifikan antara pekerja dan pemilik modal. Selain itu, ada juga ketentuan lain mengenai pesangon yang merugikan buruh dan pekerja, yaitu ketika perusahaan tutup karena alasan *force majeure*, maka perusahaan tidak wajib membayar uang pesangon kepada buruh atau pekerja.⁵

Pada hari Kamis 29 November 2012, gabungan karyawan dari McDonald's, KFC, dan Burger King di kota New York Amerika Serikat dilaporkan melakukan aksi mogok kerja. Mereka menuntut upah pekerja sebesar US\$ 15 per jam atau hampir dua kali lipat dari upah minimum yang bernilai US\$ 7,7 per jam dan juga menuntut pembentukan serikat pekerja. Para pekerja tersebut menuturkan kepada CNN money bahwa upah mereka yang sekarang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di New York City pendapatan pekerja restoran cepat saji pertahun \$11.000. Menurut gerakan Fast food Forward, angka ini hanya memenuhi 25% dari biaya hidup yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di New York City. Menurut salah satu karyawan yang mogok kerja, Raymond Lopez, ia bahkan tidak sanggup membeli makanan di restoran tempatnya bekerja. Perubahan demografi di industri makanan cepat saji menjadi satu alasan mogok kerja ini dilakukan. Resesi ekonomi jugalah yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan kini mencari nafkah di

⁵ M. Ikhwan Maulana Haeruddin. *Multinational Corporations dan Dampaknya Bagi Indonesia: Sebuah Kajian Industrial*. Diakses pada tanggal 27 Maret 2015, pukul 20.10 WIB ; tersedia dari http://www.academia.edu/3163102/MULTINATIONAL_CORPORATIONS_and_DAMPAKNYA_BAGI_INDONESIA_SEBUAH_KAJIAN_HUBUNGAN_INDUSTRIAL; Internet.

industri *fast food*.⁶ Banyak industri *fast food* raksasa seperti McDonald's, KFC, Burger King, Dunkin Donuts dan Wendy telah ditemukan memiliki sejumlah besar karyawan yang harus menggunakan program federal dan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar. Inilah yang kemudian berdampak pada upah yang diterapkan oleh industri makanan cepat saji cenderung rendah.

Permasalahan pekerja di Industri *fast food* memang cukup rumit. Di Amerika, industri restoran memiliki 10 juta pekerja dan menjadi sektor swasta yang paling cepat berkembang. Namun, upah para pekerjanya selama setahun jauh lebih rendah dibandingkan gaji CEO mereka dalam satu hari. Dari data tahun 2012 dari departemen tenaga kerja Amerika Serikat mengungkapkan bahwa 7 dari 10 pekerjaan bergaji terendah ada di industri pangan. Berdasarkan grafik EPI, gaji pertahun para CEO mengalami naik turun sepanjang periode 1993-2012. Titik terendah terjadi pada tahun 1995 yakni sekitar \$1 juta (hampir Rp 10 miliar) dan titik tertinggi ada di tahun 2012. Sedangkan dipihak lain, grafik upah para pekerja di periode yang sama tampak datar, tak pernah mencapai \$20.000 (Rp 198,5 juta). Salah satu penyebabnya adalah karena National Restaurant Association melobi agar upah minimum tetap rendah.⁷ Lebih dari 60 persen pekerja menerima gaji yang rendah padahal direkrut oleh

⁶ Fitria Rahmadiani. *Ratusan Karyawan Resto Fast Food di NYC Mogok Kerja* [berita online]. Detik.com, 3 Desember 2012 pukul 08:55 WIB, diakses pada tanggal 28 Agustus 2015 pukul 20.45 WIB; tersedia dari www.detik.com/food/read/2012/12/03/085509/2107447/297/ratusan-karyawan-resto-fast-food-di-nyc-mogok-kerja.html; Internet.

⁷ Fitria Rahmadiani. *Gaji CEO Restoran di Amerika 788 Kali Upah Pekerja* [berita online]. Detik.com, 1 Juli 2013 pukul 06:09 WIB, diakses pada tanggal 28 Agustus 2015 pada pukul 21.26 WIB; tersedia dari <http://beritaburuhindonesia.com/2013/07/01/gaji-ceo-restoran-di-amerika-788-kali-upah-pekerja.html>; Internet.

industri makanan cepat saji ternama. Ironisnya 90 persen dari perusahaan tersebut sebenarnya punya keuntungan yang sangat banyak.

Kota-kota besar di Indonesia juga tidak pernah terpisahkan dengan isu-isu seputar gejolak para pekerja khususnya yang bekerja di industri franchise berbasis multinasional. Beberapa diantaranya adalah pada tahun 2011, sekitar 20 orang yang tergabung dalam Serikat Buruh Kerakyatan bersama elemen mahasiswa melakukan unjuk rasa sebagai aksi protes di depan gerai KFC Darmo terkait dengan PHK karyawan kontrak di KFC tanpa adanya alasan yang jelas, meskipun telah memenuhi masa kerja yang cukup untuk dijadikan karyawan tetap. Menurut Erwin selaku karyawan yang di PHK mengaku tidak mengetahui alasan pemecatan dirinya meski rekan seangkatannya telah diangkat menjadi karyawan tetap. Dalam aksi ini, mereka menuntut agar pihak manajemen KFC memperkerjakan kembali karyawan di bagian delivery ini karena menurut aturan ketenagakerjaan, Erwin layak diangkat menjadi karyawan tetap.⁸

Pada tahun yang sama yaitu tahun 2011, peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta diwarnai dengan unjuk rasa lebih dari 100 orang karyawan Pizza Hut. Massa yang berdemo bersama Serikat Pekerja Mandiri ini mendemo kantor pusat Pizza Hut di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Demo yang dilaksanakan pada hari Minggu 1 Mei 2011 ini menuntut dikembalikannya uang servis. Menurut Usep

⁸ Petrus R. Di PHK Sepihak, *Karyawan KFC Demo* [berita online]. Suarakawan.com, 23 Agustus 2011 pukul 14:29 WIB, diakses pada tanggal 29 Agustus 2015 pada pukul 19.08 WIB; tersedia dari <http://suarakawan.com/di-phk-sepihak-karyawan-kfc-demo.html>; Internet.

Rusianto, Ketua Serikat Pekerja Mandiri yang juga karyawan PT Sari Melati Kencana Pizza Hut Indonesia, uang servis merupakan keuntungan dari hasil penjualan pizza dari para pelanggan yang seharusnya menjadi hak karyawan.⁹

Pada tanggal 14 Juni 2011, pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) melakukan aksi solidaritas terhadap Boni, salah satu karyawan Pizza Hut yang di PHK gara-gara salah memesan ukuran pizza. Sebelumnya, pihak manajemen Pizza Hut menuduh Boni telah membawa pizza tanpa ijin yang tegas dari atasan. Hal inilah yang menjadikan alasan Boni di pecat dari pekerjaannya. Pihak Kuasa hukum Boni menyatakan bahwa PHK yang dilakukan manajemen tidak sah. Jika memang Boni tertuduh mengambil barang perusahaan, seharusnya mereka melaporkannya ke kepolisian. Langkah tripartit sudah ditempuh dan pihak disnaker mengatakan jika kasus Boni belum diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat. Namun, anjuran disnakertrans tetap memutuskan PHK.¹⁰

Pada tanggal 6 Juli 2002, ratusan karyawan Pizza Hut mogok kerja dan berunjuk rasa di kantor Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mereka meminta agar pihak manajemen Pizza Hut mengakui

⁹ IsmokoWidjaya, dan Aries Setiawan. *Pizza Hut Jadi Sasaran Demo Karyawan* [berita online]. Viva.co.id, 1 Mei 2011 pukul 13:27 WIB, diakses pada tanggal 29 Agustus 2015 pada pukul 19.15 WIB; tersedia dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/217751-pizza-hut-jadi-sasaran-demo-karyawan.html>; Internet.

¹⁰ Hukumonline. *Salah Pesan Ukuran, Karyawan Pizza Hut Dipecat* [berita hukum online]. Hukumonline.com, 16 November 2011, diakses pada tanggal 29 Agustus 2015 pada pukul 19.30 WIB; tersedia dari <http://www.hukumonline.com/berita/bacalt4ec36e478f8fb/salah-pesan-ukuran-pekerja-pizza-hut-dipecat.html>; Internet.

keberadaan serikat pekerja di perusahaan tersebut. Menurut salah seorang pengunjuk rasa, Persaoran Simatupang, dengan adanya serikat pekerja diharapkan mereka dapat melakukan perjanjian kerja bersama pihak manajemen.¹¹

Dengan melihat beberapa fenomena tersebut, tampak bahwa doktrin hegemoni neoliberal begitu kuat. Korporasi multinasional berhasil melemahkan legitimasi pemerintah dengan melakukan dominasi terhadap penyediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal melalui investasi yang mereka miliki. Implikasinya, korporasi multinasional menerapkan sistem kerja yang seefektif dan seefisien mungkin bagi para pekerjanya sebagai upaya untuk mengakumulasi modal dengan meminimalkan kerugian. Strategi semacam inilah yang menjadikan korporasi multinasional membentuk pandangan para pekerjanya agar sama dengan kerangka yang telah dibuat. Oleh sebab itulah, penulis mengkaji permasalahan inidengan menggunakan teori hegemoni Gramsci. Gramsci memakai konsep hegemoni untuk menjelaskan bagaimana masyarakat kapitalisme modern memperbaiki dirinya dan mampu menjaga kekuasaannya atas para pekerja.

Sebagai seorang Marxis, Gramsci bergerak dalam suatu hubungan yang unik antara kesatuan teori dan praktek dalam hal perjuangan politik kelas pekerja dalam masyarakat kelas kapitalis.¹² Selain itu, hegemoni juga sebagai bentuk dominasi kelompok sosial terhadap kelompok lain untuk menundukkan mereka. Kelompok

¹¹ Getal Gaby dan Zakaria. *Karyawan Pizza Hut Mogok Kerja* [berita online]. Liputan6.com, 6 Juli 2002, diakses pada tanggal 29 Agustus 2015 pada pukul 20.06 WIB; tersedia dari <http://m.liputan6.com/news/read/37317/karyawan-pizza-hut-mogok-kerja.html>; Internet.

¹² Nezar Patria dan Andi Arief. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999. Hlm. 112.

social tersebut dapat menjadi dominan ketika ia memperaktekkan kekuasaan.¹³ Oleh karena itu, hegemoni pada hakekatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.¹⁴ Kapitalisme dalam hal ini juga masih bertahan karena kelas pekerja menerima keadaan umum ini.

Dengan demikian, hegemoni neoliberalisme memunculkan dilema praktis tersendiri. Bagi pemerintah, di satu sisi, neoliberalisme telah memberikan keuntungan bagi pemerintah untuk mengembangkan pembangunan melalui bisnis dan investasi yang berbasis multinasional. Begitupula dengan penawaran penyediaan lapangan pekerjaan atas permintaan pasar yang sangat tinggi. Namun, dominasi korporasi mutinasional melalui strategi hegemoniknya, menjadikan neoliberalisme sebagai instrument politik MNC untuk melegalkan dan menciptakan dominasinya atas pekerja. Mereka mengkonstruksi pandangan para pekerjanya sesuai dengan sistem kerja yang dibuat sedemikian rupa, sehingga menciptakan pola ketergantungan bagi para pekerja terhadap perusahaan.

¹³ *Ibid.*, hlm. 117-118.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 120-121.

I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka akan dirumuskan beberapa pertanyaan, antara lain:

1. Apa yang menjadi kepentingan korporasi multinasional dibalik sistem ketenagakerjaan yang diterapkan dalam model industri franchise di kota Surabaya?
2. Bagaimana sistem ketenagakerjaan yang diterapkan dalam model industri franchise di kota Surabaya?
3. Bagaimana reaksi pekerja atas sistem ketenagakerjaan yang diterapkan dalam model industri franchise di kota Surabaya?

I.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kepentingan korporasi multinasional dibalik sistem ketenagakerjaan yang diterapkan dalam model industri franchise di kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui sistem ketenagakerjaan yang diterapkan dalam model industri franchise di kota Surabaya.
3. Untuk mengetahui reaksi pekerja atas sistem ketenagakerjaan yang diterapkan dalam model industri franchise di kota Surabaya.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh kekuasaan, dominasi, dan kepentingan korporasi multinasional terhadap sistem ketenagakerjaan yang diterapkan dalam model industri franchise makanan cepat saji.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penerapan sistem ketenagakerjaan di industri franchise dan reaksi pekerja atas sistem kerja yang diterapkan tersebut.

I.5 Kerangka Teori

I.5.1 Teori Hegemoni

I.5.1.1 Landasan Pemikiran Gramsci Tentang Hegemoni

Pemikiran Gramsci tentang hegemoni adalah turunan dari tradisi Marxis, atau yang lebih dikenal dengan tradisi Marxisme Barat. Tradisi ini hadir karena ada rasa kekecewaan atas Marxisme ortodoks yang dianggap mengarahkan determinisme Marxisme dan teori materialis objektif sejarah. Marx meyakini bahwa kesadaran revolusioner proletariat akan muncul sebagai respon atas kondisi yang semakin memburuk dalam kehidupan masyarakat kapitalisme. Bagi kaum Marxis Barat, kesalahan besar kaum Marxis ortodoks dalam analisis deterministik ini terlihat ketika tidak adanya keruntuhan sistemik meskipun krisis ekonomi hadir dan berlalu dalam perekonomian kapitalis. Justru sebaliknya, standar kehidupan kelas pekerja semakin

membalik dengan adanya ekspansi kapitalis.¹⁵ Kapitalisme sendiripun tetap bertahan meskipun mengalami krisis dan sosialis tidak akan pernah terjadi.

Gramsci mengemukakan bahwa doktrin-doktrin yang ada telah dipengaruhi oleh scientisme kasar dan ekonomisme primitif. Scientisme kasar di sini adalah adanya keyakinan dari Marxisme yang menyatakan bahwa ada kontradiksi inheren dalam mode produksi kapitalisme yang dapat dianalisis secara ilmiah yang dapat diprediksikan dan dikuantifikasikan. Dari sinilah, manusia dianggap sebagai agen pasif yang didominasi oleh kecenderungan. Sedangkan untuk ekonomisme adalah bentuk kesalahan lain yang ditimbulkan dari scientisme kasar.¹⁶ Para penganut ekonomisme, memisahkan elemen-elemen struktural seperti politik, kebudayaan, dan ideologi dari elemen substruktural yaitu mode ekonomi produksi. Suprastruktur inilah yang kemudian dikendalikan oleh substruktur.

Berbeda dengan pandangan Marxisme ortodoks, Gramsci mengatakan bahwa aksi sadar manusia khususnya kelompok proletar bukanlah dari kepasivannya hanya untuk menunggu kapitalisme hancur baru kemudian meluapkan revolusi proletariat yang tercatat menjadi sejarah.¹⁷ Kepasivian semacam inilah yang justru merosokkan Marxisme ke dalam irelevansi politik fatalistik. Kondisi semacam inilah yang mendorong Gramsci untuk mengubah pandangan Marxisme bahwa politik bukan hanya didasarkan atau ditentukan pada basis ekonomi saja. Unsur-unsur suprastruktur

¹⁵ Muhadi Sugiono. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI). 1999. Hlm. 20.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 21-22.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

seperti ideologi, kebudayaan, kesadaran, dan politik juga menjadi faktor yang menentukan.

Gramsci mengemukakan pandangan tentang ideologi sebagai kekuatan material dan politik. Ideologi ini memberikan pengaruh signifikan untuk perubahan historis. Artinya, ideologi tidak hanya mampu untuk membebaskan kelas pekerja dari eksploitasi ekonomi kapitalis dan menggantikannya dengan dominasi kaum proletar, tapi juga membebaskan massa dari kesadaran kontradiktif, yaitu kecenderungan massa untuk meninggalkan massa lalu secara psikologis. Dari pemahaman inilah, maka Gramsci berusaha untuk mencari penjelasan atas kegagalan sosialisme yang kemudiannya menuntunnya untuk mengkaji ulang suprastruktur dan menyempurnakan gagasannya tentang hegemoni, yaitu alasan mengapa suatu kelompok atau kelas secara sukarela dengan konsensus mau menundukkan diri pada kelompok atau kelas yang lain.¹⁸

1.5.1.2 Perspektif Gramsci tentang Hegemoni

Menurut Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai selain harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai dan norma penguasa, mereka juga harus setuju atas subordinasi mereka. Inilah yang disebut Gramsci sebagai hegemoni atau menguasai dengan kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensual. Perspektif Gramsci tentang hegemoni mempunyai

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 30-31.

karakteristik khusus yang membedakannya dengan persepektif hegemoni yang lain.¹⁹ Pertama, Gramsci menerapkan konsep yang lebih luas pada supremansi satu kelompok atau lebih atas kelompok yang lain dalam setiap hubungan sosial. Kedua, hegemoni dikarakteristikkan sebagai pengaruh kultural, tidak hanya sebagai kepemimpinan politik dalam sebuah aliansi. Dari kedua karakteristik inilah, konsep hegemoni Gramsci bisa dipandang sebagai upaya menjembatani jurang antara substruktur dan suprastruktur sebagaimana yang dipahami oleh Marxisme ortodoks yang menganggap keduanya hanya sebagai kesatuan dialektis oposisi.

Gramsci membagi tiga konsep mendasar dalam membicarakan hegemoni, yaitu ekonomi, masyarakat sipil dan masyarakat politik.²⁰ Ekonomi adalah istilah untuk menunjukkan *mode of production* yang paling dominan dalam masyarakat. Masyarakat sipil di sini adalah organisasi di luar negara dalam sebuah formasi sosial di luar bagian sistem produksi material dan ekonomi seperti universitas, sekolah, media massa, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Aparatus-aparatus inilah yang memainkan peran sangat signifikan dalam pembentukan kesadaran massa. Oleh sebab itulah, kemampuan kelompok yang berkuasa dalam melestarikan kontrol sosial dan politiknya atas kelompok yang lain, sepenuhnya bergantung pada kemampuannya mengontrol aparatus-aparatus tadi. Sedangkan untuk masyarakat politik adalah semua institusi publik yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan perintah seperti

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 34.

politisi, birokrasi, dan pemerintah atau semua institusi yang merujuk pada negara. Sehingga, masyarakat politik dalam lingkup ini adalah negara.

Ketiga konsep di atas, melahirkan sebuah kesatuan konsep yang baru yang disebut dengan Negara Integral. Negara integral ini adalah perpaduan sumber koersi dalam masyarakat dan tempat kepemimpinan hegemonik. Negara integral ini adalah sebuah bentuk hegemoni yang dilapisi dengan kekuatan koersi. Dengan demikian, negara integral ini merupakan gabungan antara masyarakat sipil dan masyarakat politik.²¹ Menurut Gramsci, ada dua syarat negara integral. Pertama, alat kekerasan dan kedua adalah alat penegakan kepemimpinan hegemonik. Itulah sebabnya aparatus hegemoni Gramsci tidak semata-mata hanya bermain pada level kesadaran, ideologi, atau suprastruktur tetapi juga ada alat-alat koersi atau basis struktur yang mengikutinya salah satunya ekonomi.²²

Gramsci meyakini bahwa hegemoni ideologi terbentuk terutama oleh masyarakat sipil ketimbang institusi negara. Dalam formulasi ini, hegemoni merupakan sebuah konsepsi tentang realitas, disebarluaskan oleh institusi sipil, yang menginformasikan nilai-nilai, kebiasaan dan prinsip-prinsip spiritual, yang membentuk konsensus terhadap status quo di dalam semua strata masyarakat. Hegemoni merupakan sebuah pandangan terhadap dunia, yang ketika diinternalisasikan menjadi 'pemikiran yang masuk akal' Termasuk di dalamnya formasi perilaku

²¹ Antonio Gramsci. *Selection from the Prison Notebooks*. Amerika Serikat: International Publiser. 1971. hlm. 169-170.

²² Nezar Patria dan Andi Arief. *Op.Cit.*, hlm. 144

ekonomi di dalam masyarakat. Dengan demikian, Gramsci memandang rasionalitas ekonomi memenuhi kebutuhan materi dengan membentuk sebuah kompleks keyakinan, dari mana tujuan-tujuan kongkrit diajukan kepada kesadaran kolektif.

Sebuah hubungan hegemonik terjadi jika kelompok berkuasa berhasil mendapatkan persetujuan subordinat atas subordinasi yang mereka lakukan. Kelompok-kelompok subordinat menerima ide-ide dan kepentingan politik kelompok yang berkuasa seperti halnya milik mereka sendiri. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan kelompok yang berkuasa tidak ditentang karena ideologi, kultur, nilai, norma, dan politiknya sudah diinternalisasi sebagai milik mereka sendiri oleh kelompok subordinat. Teori hegemoni Gramsci inilah yang membedakannya dengan teori Marxisme klasik yang mana ketika Gramsci lebih menekankan pada konsensus daripada kekuatan dan dominasi sebagai pondasi dalam tatanan sosial.²³

Teori hegemoni Gramsci menjelaskan alasan mengapa suatu kelompok yang berkuasa harus memperjuangkan legitimasi kekuasaannya dari kelompok yang lain. Kelompok yang berkuasa harus menguniversalkan pandangan dan kepentingannya agar menjadi pandangan dan kepentingan yang sama bagi kelompok yang dikuasai. Hal inilah yang kemudian menjadikan kelompok yang berkuasa harus mampu membuat kelompok lain menerima prinsip, ide, nilai, dan norma sebagai milik mereka juga. Setelah pandangan dari kelompok yang berkuasa ini sudah diterima dan diinternalisasi oleh kelompok yang lain, maka kelompok berkuasa ini telah

²³ Muhadi Sugiono. *Op.Cit.*, hlm. 39.

memantapkan hegemoninya dan legitimasinya untuk memerintah telah terjamin. Dengan kata lain, hegemoni satu kelompok atas kelompok lainnya, tidaklah dipaksakan. Hal ini karena hegemoni diraih dari upaya-upaya politis, kultural, dan intelektual.

Hegemoni kelas yang berkuasa terhadap kelas yang dikuasai sesungguhnya dibangun oleh mekanisme konsensus. Ketika Gramsci berbicara tentang konsensus, ia selalu mengkaitkannya dengan spontanitas yang bersifat psikologis yang mencakup penerimaan aturan sosiopolitis dan aspek-aspek aturan lainnya. Menurut Gramsci, ada tiga tipe hegemoni.²⁴ Pertama, orang menyesuaikan diri mungkin karena takut akan konsekuensi-konsekuensi bila ia tidak menyesuaikannya. Kedua, orang menyesuaikan diri mungkin karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu. Dan ketiga, konformitas yang muncul dari tingkah laku mempunyai tingkat-tingkat kesadaran dan persetujuan dengan unsur tertentu dalam masyarakat. Bagi Gramsci, hegemoni melalui konsensus muncul melalui komitmen aktif atas kelas social yang secara historis lahir dalam hubungan produksi.

1.5.1.3 Counter Hegemony

Konsep tentang *counter hegemony* atau kontra hegemoni lahir dari pemikiran Gramsci sebagai jawaban atas proses hegemoni kelompok dominan. Gramsci menjelaskan bahwa realitas sosial ditunjukkan dengan adanya karakter kapitalistik

²⁴ Nezar Patria dan Andi Arief . *Op.Cit.*, hlm. 124-125.

yang eksploitatif bahkan memunculkan gejala *go to silent* para revolusioner. Gejala diamnya revolusioner dari kelas pekerja disebabkan oleh seperangkat kepentingan politik yang menghegemoni dan diselundupkan kepadanya. Dalam kondisi yang demikian inilah kalangan cendekiawan-transformatif yang disebut Gramsci sebagai intelektual organik sangat diperlukan.²⁵

Peran intelektual organik menurut Gramsci langsung berhubungan dengan cara produksi dominan. Ia memiliki tugas untuk memberikan homogenitas atau kesadaran yang tidak hanya pada lapangan ekonomi namun juga pada lapangan sosial dan politik. Intelektual organik dapat berasal dari kelas borjuis yang berpihak pada kepentingan borjuasi maupun dapat berasal dari kelas pekerja (proletar) yang juga membela kepentingan proletariat. Mereka secara keseluruhan dapat memberikan perspektif yang baru yang menciptakan satu kesatuan dan hubungan dengan kelompok massa.²⁶

Analisis Gramsci tentang hegemoni identik dengan penyusunan kekuasaan. Ia mempercayai teoritisi dan realisasi hegemoni sangat membenci Taylorisme yangmana merupakan sebuah praktek teknokratisme dan korporatisme yang menjadi eksperimen kapitalis untuk mendisiplinkan para pekerja melalui spesialisasi mekanis dengan metode yang mengutamakan efisiensi. Itulah sebabnya, keterlibatan kaum intelektual selain sebagai pengawal hegemoni dan sebagai bentuk *counter hegemony*

²⁵ Ibid., hlm. 116.

²⁶ Antonio Gramsci. *Op.Cit.*, hlm. 5-6

menjadi sangat penting. Peran intelektual dalam sebuah transformasi adalah dasar dari superstruktur yang ada. Mereka ini harus berdiri pada dua wilayah yaitu intelektual teori dan intelektual yang mampu menghubungkannya dengan realitas nyata sosial. Intelektual organik ini secara sadar mampu menghubungkan teori dan realitas sosial yang ada dan juga bergabung dengan kelompok-kelompok revolusioner yang ada untuk melakukan *counter hegemony* pada sebuah transformasi sosial yang direncanakan.

Perjuangan kelas haruslah melibatkan ideologi dan gagasan-gagasan akan bagaimana masyarakat terbebas dari penindasan. Ideologi dan gagasan ini harus mengalahkan supremansi kelas borjuis yang mendominasi ekonomi melalui kepemimpinan moral dan intelektual. Intelektual organik adalah aktor yang berperan penting untuk melakukan kontra hegemoni. Hal ini dilakukan dengan melibatkan kepentingan kekuatan sosial dan kelompok-kelompok pergerakan lain untuk menemukan titik temu kepentingan. Diperlukannya dibangun aliansi dengan kelompok minoritas. Adapun cara untuk melakukan *counter hegemony* yaitu melalui perang posisi. Perjuangan panjang dengan kemampuan untuk memimpin ideologis dan kebudayaan melalui sejumlah strategi. Kerja kontra hegemoni akan otomatis terhenti apabila telah tercapai masyarakat yang terbebas dari segala bentuk penindasan.

Faktor kesadaran menentukan langkah revolusioner berikutnya di masa-masa krisis hegemoni. Hal ini direspon oleh Gramsci yang melihat kaitan antara

masyarakat dan kapitalis. Makin maju industri di sebuah negara, maka militansi para pekerjanya semakin rendah untuk menjatuhkan para kapitalis. Inilah menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi diikuti oleh kemajuan superstruktur ideologi yang menjadikan para pekerja ataupun buruh menjadi tidak militan. Inilah sebabnya perang posisi (*War of Position*) merupakan pilihan alternatif yang ditawarkan oleh Gramsci sebagai upaya untuk melawan hegemoni dari para kapitalis.

Ada dua prasyarat untuk melakukan perang posisi. Pertama, harus memiliki survey terlebih dahulu yang tepat sebagai strategi revolusionernya yang dilakukan berdasarkan situasi atau kondisi pada masing-masing negara. Kedua, yaitu berbasis pada gagasan mengepung aparatus negara. Dengan demikian, kontra hegemoni dapat diciptakan oleh organisasi massa kelas pekerja (proletar) dengan membangun lembaga-lembaga yang kemudian mengembangkan budaya mereka. Kebudayaan para proletar inilah yang kemudian dijadikan landasan dari budaya baru dengan nilai dan norma yang juga baru dari masyarakat proletar.²⁷

²⁷ Nezar Patria dan Andi Arief . *Op.Cit.* hlm. 172.

I.6 Kerangka Konseptual

I.6.1 Hegemoni

Hegemoni menurut Gramsci adalah sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu terhadap negara lain yang berhubungan secara longgar maupun ketat terintegrasi dalam negara pemimpin. Selain itu, hegemoni juga sebagai bentuk dominasi kelompok social terhadap kelompok lainya untuk menghancurkan atau menundukkan mereka. Kelompok social tersebut dapat menjadi dominan ketika ia memperaktekkan kekuasaan.²⁶ Dominasi dan kepemimpinan ini adalah konsep yang dijalankan atas seluruh musuh dan sekutu. Kepemimpinan merupakan suatu prakondisi untuk menaklukkan negara, sedangkan dominasi digunakan untuk mencapai kekuasaan terhadap negara. Jadi menurut Gramsci, kelas social akan memperoleh keuntungan melalui dua cara yaitu dominasi atau paksaan dan yang kedua adalah kepemimpinan intelektual dan moral. Jadi, konsepsi hegemoni adalah realitas politik dimana terdapat keseimbangan antara kepemimpinan yang berbasis pada persetujuan, dengan dilakukan dominasi.

Hegemoni juga dapat dimengerti sebagai sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus dan bukan penindasan kelas. Adapun beberapa cara diantaranya adalah melalui institusi yang ada di masyarakat menentukan secara langsung atau tidak struktur kognitif dari masyarakat. Oleh karena itu, hegemoni pada hakekatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang

²⁶ Nezar Patria dan Andi Arief. *Op.Cit.*, hlm. 117-118.

problematika social dalam kerangka yang ditentukan.²⁷ Hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologi satu atau lebih kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari yang lainnya. Kapitalisme dalam hal ini juga masih bertahan karena kelas pekerja menerima keadaan umum ini, dominasi budaya borjuis membuat penggunaan kekuatan politik tak perlu untuk mempertahankan kekuasaan.

1.6.2 Neoliberalisme

Neoliberalisme ini adalah paham yang mengurangi atau menolak intervensi pemerintah dalam sistem perekonomian negara yang kemudian berimplikasi pada kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan pembukaan pasar bebas. Paham ini juga berusaha untuk memangkas bahkan menghabisi peran pemerintah dalam pengelolaan ekonomi sampai tahap otoritas legitim yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengelola Negara habis. Negara dalam neoliberalisme hanya berperan dalam mempertahankan peran tradisionalnya yaitu pengembangan teknik mengontrol warga tanpa harus bertanggungjawab kepada mereka. Tolak ukur dari gagasan ekonomi-politik neoliberal adalah argumen bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal jika hanya lalu lintas barang/jasa/modal tidak dikontrol oleh regulasi apapun.

Friedrich August von Hayek dan Milton Friedman yang dikenal sebagai teoritis neoliberalisme menyatakan bahwa keunggulan kapitalisme pasar bebas adalah dengan membiarkan jutaan individu mereaksi secara individual terhadap harga pasar yang tercapai bebas, terjadilah optimalisasi alokasi modal, kreativitas manusia

²⁷l. Wibowo dan Francis Wahono. *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cindelarast Pustaka Cerdas. 2003. Hlm. 120-121.

dan tenaga kerja dengan cara yang tidak mungkin ditiru oleh perencanaan sentral.³⁰ Dengan demikian, satu-satunya tanggungjawab sosial bisnis adalah menggunakan seluruh sumber dayanya untuk aktivitas yang mengabdikan akumulasi modal.

Neoliberalisme adalah misi khusus yang mana menolak atau mengurangi campur tangan Negara dalam ekonomi untuk diganti dengan pasar.³¹ Artinya, dalam paham neoliberal, pasar dijadikan satu-satunya cara atau sistem untuk mengatur perekonomian dan sekaligus sebagai tolak ukur dalam menilai semua keberhasilan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Implikasinya, masyarakat dan Negara hanya menjadi instrumen yang diperlukan untuk menjamin akumulasi kekayaan oleh segelintir orang.

Dominasi paham neoliberal terhadap Negara, menjadikan Negara tidak lagi bertanggung jawab membantu orang-orang yang tidak produktif. Peran pemerintah hanya dibatasi untuk menciptakan kerangka di mana tiap orang bisa bekerja dengan baik dan mengejar tujuannya masing-masing dan bukan menjamin kesejahteraan umum. Semenjak itu pulalah, timbul kalimat yang memerintahkan agar orang lebih berusaha keras mencari pekerjaan dan tidak menunggu uluran tangan pemerintah saja.³²

Neoliberalisme menerapkan prinsip transaksi ekonomi dalam semua bidang relasi sosial. Tindakan dan hubungan antar pribadi maupun tindakan dan hubungan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 53.

³¹ Deliarnov. *Ekonomi Politik: Mencangkup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*. Jakarta: Erlangga. 2006. Hlm. 164.

³² *Ibid.*, hlm. 169.

legal, sosial dan politis adalah ungkapan dari model hubungan menurut kalkulasi untung-rugi individual dalam transaksi ekonomi. Oleh sebab itulah, ekonomi neoliberal melihat modal dan tenaga kerja dalam arti subjektif. Artinya, upah seseorang bukanlah harga bagi tenaga kerja yang dijual, melainkan dari modal yang dipunyainya. Orang-orang yang diupah itu bukan buruh atau pegawai yang tergantung pada perusahaan, melainkan para wirausaha bebas yang bertanggungjawab atas keputusan dan perkembangannya sendiri.³³ Dalam gagasan inilah eksploitasi, pemaksaan, penguasaan, kekuasaan dan sebagainya terkubur dengan rapi. Hal ini dikarenakan gagasan neoliberal menyembunyikan masalah seperti eksploitasi serta penguasaan, dan menganggapnya tidak relevan. Dengan demikian, bukan dihapuskannya soal kekuasaan dan eksploitasi, melainkan hanya disembunyikannya masalah kekuasaan dan eksploitasi.

1.6.3 Kekuasaan Multinasional

Kekuasaan merupakan sebuah konsep yang melekat dalam sebuah proses politik. Di dalam kajian tentang ilmu politik, ada beberapa konsep yang terkait dengan kekuasaan.³⁴ Adapun diantaranya adalah *influence*, *persuasion*, manipulasi, *coercion*, *force* dan *authority*. Pertama, *influence* adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Kedua, *persuasion* adalah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Ketiga, manipulasi adalah penggunaan pengaruh yang mana

³³ I. Wibowo dan Francis Wahono. *Op.Cit.*, hlm. 56-57.

³⁴ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 1992. Hlm. 57

pihak yang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya sebenarnya mematuhi keinginan pemegang kekuasaan. Keempat, *coercion* adalah ancaman atau paksaan seseorang atau kelompok terhadap pihak yang lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang memiliki kekuasaan. Kelima, *force* adalah penggunaan tekanan fisik yang membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit ataupun membatasi pemenuhan keputusan terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu.

Dari pemahaman di atas, secara umum kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku seorang pelaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari perilaku yang mempunyai kekuasaan. Dalam hal ini, pelaku bisa berupa seorang, sekelompok orang atau kolektivitas.³⁵ Kekuasaan diselenggarakan melalui isyarat yang jelas dan yang demikian disebut dengan kekuasaan manifest. Adapun untuk sumber-sumber kekuasaan dapat meliputi banyak hal, diantaranya kedudukan, kepercayaan, dan kekayaan. Cakupan kekuasaan menunjuk pada kegiatan, perilaku, serta sikap dan keputusan-keputusan yang menjadi objek dari kekuasaan. Dalam suatu hubungan kekuasaan selalu ada satu pihak yang lebih kuat sehingga hubungan menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan inilah yang kemudian menimbulkan ketergantungan.

Multinasional adalah sebutan bagi korporasi atau perusahaan yang memiliki fasilitas dan aset-aset di negara lain di luar negara asal korporasi tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kantor atau cabang di negara-negara lain

³⁵ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008. Hlm. 60

dan biasanya memiliki kantor pusat tempat mereka mengkoordinasikan manajemen global. Korporasi-korporasi besar yang berasal dari negara maju secara masif mendirikan cabang-cabangnya serta menyebar hampir di seluruh negara di dunia. Untuk menjadikan perusahaan/korporasi menjadi berstatus multinasional, dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya a) Lisensi dan Waralaba; b) Aliansi Strategi; c) Joint Venture (Usaha Patungan); d) Anak Perusahaan di luar negeri. Mendirikan anak perusahaan di luar negeri dengan bentuk entitas tersendiri sesuai dengan peraturan negara setempat (host country).³⁶

Dalam konteks dua pemaknaan inilah, maka yang dimaksud dengan kekuasaan multinasional adalah kemampuan yang dimiliki oleh korporasi multinasional untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah khususnya yang terkait dengan ekonomi dan politik. Mereka menggunakan kekuasaan manifest terhadap negara yang dijadikan objek kekuasaannya agar negara tersebut tunduk dan mau menjalankan apa yang menjadi tujuan dan keinginan korporasi multinasional. Selain itu, untuk semakin menguatkan kekuasaannya, korporasi multinasional membangun relasi kerja dengan menggunakan dan mengkombinasikan cara-cara yang melekat pada konsep kekuasaan itu sendiri, diantaranya adalah *influence*, manipulasi, dan *coercion*.

³⁶ M. Paulus Situmorang. *Managing In Global Environment* [artikel online]. Depkeu.go.id, diakses pada tanggal 11 Maret 2015, pukul 8.27 WIB; tersedia dari <http://www.bppk.depkeu.go.id/webku/images/managing-in-a-global-environment-mp-situmorang>; Internet.

1.6.4 Sistem Ketenagakerjaan

Sistem ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja yang dikemas menjadi rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang membentuk serangkaian pola dalam rangka melaksanakan satu pekerjaan.³⁷

Menurut George Ritzer, sistem ketenagakerjaan adalah serangkaian dimensi yang diadopsi dari hukum rasionalitas. Sistem ketenagakerjaan yang demikian biasanya diadopsi oleh industri franchise makanan cepat saji. Adapun serangkaian dimensi tersebut meliputi, pertama, efisiensi atau metoda optimal bagi perolehan dari satu point kepoint lainnya. Pekerja di sistem ini akan berfungsi secara efisien. Pengelola melatih dan mengawasinya agar mereka yakin atas apa yang dikerjakan. Hukum dan aturan organisasi juga berperan mendorong terciptanya kerja yang efisien. Cara yang dinilai paling efisien untuk melakukan beraneka ragam pekerjaan itu dimasukkan sebagai materi pelatihan manual serta diajarkan kepada para pengelola. Pengelola diminta menularkannya kepada para pekerja baru. Pola industri franchise makanan cepat saji dan keragaman teknologinya ditempatkan pada porsi membantu terciptanya cara paling efisien memberi makan sejumlah besar orang.³⁸

Kedua, daya hitung atau penekanan pada aspek kuantitatif atas produk yang dijual serta layanan yang ditawarkan. Daya hitung mencakup penekanan pada

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

³⁸ George Ritzer. *Ketika Kapitalisme Berjengkrang: Telaah Kritis Terhadap Gelombang McDonaldisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002. Hlm. 80-81.

sesuatu yang bisa dikalkulasi, dihitung dan dibilang.³⁹ Pekerja dalam sistem ini lebih menekankan seberapa cepat tugas-tugas bisa diselesaikan. Analoginya disesuaikan dengan tuntutan situasi pembeli, pekerja juga diharapkan mampu mengerjakan beragam pekerjaan secara cepat dengan sedikit pengorbanan. Penekanan daya hitung pada aspek kuantitatif ini adalah usaha untuk memangkas proses produksi dan layanan menjadi bilangan. Kecepatan bahkan menjadi lebih penting bukan hanya pada jumlah penjualan dan kecepatan pengantarannya, melainkan juga seberapa hangat makanan itu mampu diantar ke tempat tujuan.

Ketiga, daya prediksi yaitu rasa yakin bahwa produk dan layanannya akan tetap sepanjang waktu dan di seluruh lokasi. Dalam hal ini rasionalisasi melibatkan penambahan upaya yang mampu meyakinkan daya prediksi dari satu waktu atau tempat ke yang lainnya. Pekerja di sistem ini mematuhi perusahaan dan juga penugasan pengelola. Tidak hanya meliputi apa yang harus mereka kerjakan tetapi apa pun yang harus dikatakan, semuanya bisa diprediksi.

Keempat, kontrol. Secara tidak disadari, pekerja dalam model sistem ini berada pada tingkat kontrol yang tinggi. Mereka dilatih mengerjakan sejumlah pekerjaan sesuai jatah waktu yang diberikan. Teknologi yang dipakai dan cara-cara yang ditetapkan perusahaan akan memperkuat kontrol ini. Pengertian teknologi di sini lebih luas daripada sekedar mesin-mesin peralatan, akan tetapi juga material, skill, pengetahuan, hukum, aturan, prosedur, serta teknik. Teknologi mencakup tidak hanya hal-hal nyata seperti robot, dan komputer tetapi juga aturan serta petunjuk

³⁹ *Ibid.*, hal 105.

birokrasi yang menjelaskan mengenai prosedur dan teknik yang berlaku.⁴⁰ Pengelola dan pengawaspun merasa yakin bahwa pekerja tunduk pada alur yang ditentukan. Tidak pandang seberapa besar mereka merasa terprogram dan terkontrol, pekerja dipaksa tunduk pada operasi sistem. Oleh sebab itulah, teknologi makin meningkatkan kontrol perusahaan atas pekerja.

1.6.5 Industri Franchise

Industry franchise dapat diartikan dengan beberapa pengertian.⁴¹ Pertama menurut Douglas J. Queen yang mengartikan franchise adalah suatu metode perluasan pemasaran dan bisnis. Suatu bisnis memperluas pasar dan distribusi produk serta pelayanannya dengan membagi bersama standar pemasaran dan operasional. Pemegang franchise yang membeli suatu bisnis yang menarik manfaat dari kesadaran pelanggan akan nama dagang, sistem teruji dan pelayanan lain yang disediakan pemilik franchise. Kedua, menurut Dominique Voillemont, franchise sebagai suatu cara melakukan kerja sama di bidang bisnis antara dua atau lebih perusahaan, satu pihak bertindak sebagai franchisor dan pihak lain sebagai franchisee, pada mana di dalamnya diatur, bahwa pihak franchisor sebagai pemilik suatu merk dan know how, memberikan haknya kepada franchisee untuk melakukan kegiatan bisnis berdasarkan merk know how itu.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 180.

⁴¹ Juajir Sumardi. *Naskah Buku: Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*. Jakarta: Arus Timur (kelompok Pustaka Refleksi). 2014.

I.7 Metode Penelitian

I.7.1 Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif, dimana dalam penelitian ini akan menguraikan mengenai suatu gejala sosial. Tujuannya untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi dan variabel. Menurut Lisa Harrison, penelitian kualitatif menganalisis perilaku dan sikap politik yang tidak dapat dikuantitatifkan. Jenis penelitian ini juga akan membuat peneliti terlibat dalam setting sosial yang menjadi tujuan penelitiannya. Hal yang demikian menjadikan peneliti bisa secara langsung mengamati situasi dan ikut beraktifitas bersama mereka.⁴²

Jenis penelitian ini dipilih oleh peneliti karena bermaksud untuk mengetahui lebih jauh kepentingan korporasi multinasional dibalik sistem ketenagakerjaan yang ditetapkan di industri franchise, sistem ketenagakerjaan yang diterapkan di industri franchise, dan juga reaksi pekerja atas sistem ketenagakerjaan yang diterapkan di industri franchise.

I.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilangsungkan di kota Surabaya. Hal ini mengingat kota Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduknya lebih dari 2,7 juta jiwa dan pusat bisnis, perdagangan, industri, serta pendidikan di kawasan timur Pulau Jawa dan sekitarnya. Selain itu, kota Surabaya juga menjadi salah satu destinasi favorit bagi investor franchise makanan cepat saji untuk

⁴² Lisa Harison. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007. Hlm 86.

menginvestasikan sumberdaya modal mereka. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah restoran franchise makanan cepat saji seperti MC Donalds, KFC, Pizza Hut, dan lain sebagainya tumbuh dan berkembang di kota Surabaya. Dengan alasan inilah, maka peneliti akan lebih mudah untuk mendapatkan informan/subjek dari beberapa restoran franchise makanan cepat saji guna membongkar kepentingan multinasional yang tersembunyi di balik sistem ketenagakerjaan yang diterapkan di industri franchise makanan cepat saji, mengetahui sistem kerja yang diterapkan, dan juga mengetahui bagaimana reaksi pekerja atas sistem ketenagakerjaan yang diterapkan di industri franchise tersebut.

1.7.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, istilah mengenai subyek penelitian adalah informan atau narasumber. Mereka inilah yang memberikan beberapa sumber informasi terkait dengan penelitian ini. Menurut Lisa Harrison setidaknya kita mengenal siapa atau apa yang akan menjadi subjek dan kita harus melakukan pengenalan dalam lingkungan subjek penelitian.⁴³

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah beberapa pekerja yang bekerja di industry franchise makanan cepat saji, yang meliputi store manager, karyawan tetap, karyawan kontrak (PKWT), *Outsourcing*, karyawan part time dan juga Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya.

⁴³ *Ibid*, hlm. 86.

1.7.4 Jenis Data

1.7.4.1 Data Primer

Dalam penelitian kualitatif, sumber utamanya ialah kata-kata dan tindakan. Oleh karena itu, data-data yang diperlukan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ini, peneliti memperolehnya melalui wawancara dan pengamatan terhadap subjek-subjek penelitian yang telah ditentukan. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

Penulis dalam penelitian yang berjudul “Hegemoni Neoliberalisme: Praktek Kekuasaan Multinasional dan Sistem Ketenagakerjaan Dalam Model Industri Franchise di Kota Surabaya Tahun 2015”, berupaya untuk memperoleh data primer berupa:

- Alokasi keuntungan atau akumulasi laba yang didapat korporasi multinasional
- Sistem/peraturan kerja yang diterapkan di industri franchise makanan cepat saji
- Problematika ketenagakerjaan di industri franchise makanan cepat saji
- Sikap dan tindakan para pekerja atas implementasi sistem kerja yang diterapkan.

1.7.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang dapat diperoleh dari sumber data tertulis, foto atau data statistik. Dalam hal ini peneliti ingin mendapatkan data sekunder berupa:

- Perekonomian dan investasi di kota Surabaya
- Penyebaran industri franchise makanan cepat saji berbasis multinasional di kota Surabaya
- Pengaturan tentang investasi di kota Surabaya
- Penyebaran tenaga kerja di industri makanan cepat saji berbasis multinasional di kota Surabaya
- Peraturan tentang ketenagakerjaan
- Data tentang laporan persoalan ketenagakerjaan industri makanan cepat saji berbasis multinasional di kota Surabaya

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dalam upaya mengumpulkan data, peneliti menggunakan dua alat riset yaitu wawancara dan observasi.⁴⁴

Pertama, wawancara secara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan (pedoman wawancara). Peneliti berperan mengkomunikasikan

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 91

pertanyaan-pertanyaan inti sebagaimana tertera dalam *interview guide* sehingga informan dapat memahami pertanyaan tersebut. Dalam wawancara ini dimungkinkan penulis dapat menggali lebih jauh jawaban informan dengan pertanyaan-pertanyaan baru yang merupakan pengembangan dari pertanyaan inti yang ada di dalam pedoman wawancara.

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan atau narasumber yakni beberapa pekerja yang bekerja di industry franchise makanan cepat saji, yang meliputi store manager, karyawan tetap, karyawan kontak (PKWT), *outsourcing*, dan karyawan part time.

Kedua, observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala-gejala sosial yang relevan dengan obyek penelitian. Penulis menggunakan observasi non partisan, yakni peneliti tidak melibatkan diri secara langsung dalam bagian dari kehidupan yang diteliti. Penulis hanya mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap sikap, pendapat, pengetahuan, pemahaman, kegiatan dan hal-hal lain yang sekiranya dapat mendukung penelitian.

1.7.6 Unit Analisis

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis organisasi dan unit analisis personal. Dari kedua unit analisis inilah, penulis mencoba untuk menemukan siapa saja dan apa yang menjadi subjek penelitiannya.

Pertama, pada penggunaan analisis organisasi, dalam hal ini unit analisisnya adalah gerai-gerai franchise yang berbasis mutinasional yang ada di kota Surabaya

seperti McDonald, KFC, Pizza Hut, dan lain sebagainya, serta Dinas Ketenagakerjaan kota Surabaya. Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan objektif atas sistem ketenagakerjaan yang diterapkan dalam model industri franchise di kota Surabaya dan kepentingan korporasi multinasional dibalik sistem ketenagakerjaan yang diterapkan tersebut. Oleh sebab itulah, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat pada unit organisasi ini adalah sebagai representasi organisasi.

Kedua, pada penggunaan unit analisis personal, dalam hal ini unit analisisnya adalah pekerja yang bekerja di industri franchise kota Surabaya sebagai individu yang mewakili dirinya sendiri. Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan objektif atas reaksi pekerja atas sistem ketenagakerjaan yang diterapkan dalam model industri franchise. Dengan demikian, maka pertanyaan-pertanyaan yang dibuat pada unit personal ini adalah terkait dengan pendapat individu.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif. Analisis tersebut digunakan dengan cara pengumpulan data yang diperoleh kemudian diseleksi dan dianalisa secara kualitatif dengan berpedoman pada kerangka teoritik guna memberikan gambaran yang jelas dari fenomena yang diteliti. Dalam proses analisis data kualitatif terdapat beberapa cara, yaitu: pertama, dengan pemetaan (mapping). Pemetaan ini dibuat untuk mencari persamaan dan perbedaan klasifikasi yang muncul dari data yang tersedia. Kedua, dengan menghubungkan hasil-hasil temuan dengan referensi dan teori yang berlaku dan mencari hubungan diantara sifat-sifat kategori.

Hasil wawancara disusun untuk mengetahui kategori tertentu, atau pokok permasalahan tertentu yang menunjuk pada permasalahan penelitian. Untuk selanjutnya dilakukan interpretasi deskriptif dengan mengacu pada landasan teoritik yang digunakan.

I.8 Simpulan Teoritik

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, berikut adalah simpulan teoritiknya. Pertama, kepentingan korporasi multinasional dibalik sistem ketenagakerjaan yang diterapkan di industri franchise adalah untuk mempertahankan kekuasaan dan memaksimalkan akumulasi modal yang mereka miliki melalui dominasi terhadap proses tawar atas pemerintah dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan. Hal inilah yang kemudian memudahkan korporasi multinasional untuk mengintervensi kebijakan pemerintah tentang investasi dan sistem ketenagakerjaan. Merujuk pada konsep ekonomi neoliberal yang menerapkan prinsip transaksi ekonomi dalam semua bidang relasi sosial, korporasi multinasional menggunakan strategi hegemoniknya dengan cara membentuk pandangan para pekerjanya sesuai dengan kerangka yang dikemas berdasarkan kepentingan mereka. Dari strategi inilah, korporasi multinasional mampu menciptakan pola ketergantungan pekerja terhadap perusahaan. Dengan demikian, eksploitasi, pemaksaan, penguasaan, kekuasaan dan sebagainya terkubur dengan rapi dalam sistem ketenagakerjaan yang diterapkan dalam industri franchise.

Kedua, dengan berpijak pada paham neoliberal, industri franchise makanan cepat saji berbasis multinasional mengadopsi prinsip-prinsip rasionalitas Barat pada sistem ketenagakerjaan yang diterapkannya. Konsep rasionalitas inilah yang kemudian disebut Ritzer sebagai McDonaldisasi, yang diantaranya meliputi efisiensi, daya hitung, daya prediksi, dan kontrol. Keempat hal ini dikemas oleh korporasi multinasional dalam sistem kerja yang diterapkan sebagai bentuk hegemoni yang dilakukan terhadap para pekerjanya agar menimbulkan pola ketergantungan.

Ketiga, sistem ketenagakerjaan yang diterapkan dalam model industri franchise yang mengadopsi prinsip-prinsip rasionalitas Barat menimbulkan sederet sistem irasionalitas. Sistem irasionalitas ini merupakan dampak negatif yang ditimbulkan dari penerapan sistem ketenagakerjaan yang berbasis rasionalitas itu sendiri. Atas sederet sistem kerja irasionalitas itulah yang kemudian menimbulkan reaksi yang beragam dari para pekerja. Ada kecenderungan pekerja yang tetap bekerja dengan alasan takut akan konsekuensi yang ditimbulkan jika tidak mematuhi peraturan kerja yang ditetapkan, ada yang bekerja karena telah terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara tertentu, dan adapula yang enggan sengaja mengubah sikap juga sikap dan perilakunya agar sesuai dengan sistem kerja yang diterapkan. Reaksi beragam ini dapat diidentifikasi melalui tipologi hegemoni Gramsci yang dibentuk melalui konsensus. Dengan pembentukan konsensus inilah, korporasi multinasional akan lebih mudah untuk menciptakan pola ketergantungan bagi para pekerjanya. Sehingga loyalitas mereka terhadap perusahaan lahir melalui kesadaran yang telah dibentuk melalui kerangka yang telah ditentukan oleh korporasi multinasional.